

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan perusahaan yang didirikan oleh Pemerintahan Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai sumber pendapatan Pemerintahan Daerah. Pembentukan Perusahaan Daerah biasanya didasarkan atas kebutuhan akan pengelolaan sarana milik publik yang salah satunya adalah air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Untuk itu, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air, Pemerintahan Daerah membentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM memiliki peran diantaranya, dalam bidang pengelolaan air bersih, penyaluran air kotor daerah, dan meningkatkan kesejahteraan untuk rumah tangga maupun industri. Sedangkan tujuan PDAM adalah:

1. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan air minum.
2. Memperoleh pendapatan yang wajar agar perusahaan mampu mengembangkan diri sesuai dengan fungsinya.
3. Menyelenggarakan pemanfaatan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat. (Arsip Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Karier Tata Usaha dan Personalia PDAM Kota Bandung, 2001: 2).

Dalam menjalankan perannya bagi masyarakat, PDAM dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan atau melakukan perkembangan-perkembangan seiring dengan perubahan ekonomi, perubahan kondisi konsumen yang terus bertambah, serta kebutuhan perusahaan itu sendiri. PDAM harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengevaluasi dan merencanakan aktivitas

perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satu bentuk pelaksanaannya, perusahaan perlu mengetahui kondisi keuangan, yang merupakan gambaran tingkat kesehatan perusahaan dengan menggunakan analisis kinerja keuangan perusahaan.

Pada umumnya perhatian pertama dari analisis kinerja keuangan perusahaan adalah likuiditas. Analisis ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan (S Munawir, 2004: 31). Likuiditas yang rendah dapat menyebabkan perusahaan mengalami banyak kerugian, diantaranya tidak terpenuhinya kewajiban kepada kreditor, dapat mengurangi kebebasan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan atau melakukan kebijakan, kerugian atas kesempatan mendapatkan keuntungan dari diskon, bahkan dapat mengarahkan perusahaan kepada kebangkrutan.

Bagi Perusahaan Daerah, likuiditas yang rendah tentunya dapat menyebabnya rendahnya kebebasan perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sebagaimana diberitakan dalam www.detikNet.com (18 November 2005), PDAM Kota Bandung memiliki utang sebesar Rp. 300 milyar yang digunakan pada program *Bandung Urban Development Project* (BUDP) pada tahun 1979 dan sampai saat ini pula PDAM Kota Bandung belum mampu memenuhi cicilannya. Akibatnya PDAM Kota Bandung tidak dapat meningkatkan pelayanan air bersihnya kepada masyarakat. Dari pemberitaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDAM Kota Bandung memiliki nilai likuiditas yang rendah atau illikuid, karena PDAM Kota Bandung tidak dapat memenuhi kewajiban yaitu kewajiban atas cicilan kewajiban jangka

panjang yang bunga dan pokok pinjamannya terus bertambah. Dan untuk lebih jelasnya, berikut data likuiditas PDAM Kota Bandung pada tahun 1996-2005.

Tabel 1.1
Likuiditas (1996-2005)

Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar	Likuiditas	Selisih (%)
1996	25.566.188.284	78.871.397.428	0,324	-
1997	19.951.323.546	19.513.565.748	1,022	68,30
1998	23.195.449.214	31.582.626.480	0,734	-39,21
1999	28.751.167.152	59.908.423.626	0,480	-53,03
2000	32.921.624.419	82.507.065.216	0,399	-20,28
2001	41.509.697.417	105.257.049.462	0,394	-1,18
2002	50.402.216.350	129.865.199.866	0,388	-1,61
2003	51.105.931.960	159.885.344.419	0,320	-21,42
2004	36.120.408.927	169.649.829.144	0,213	-50,13
2005	51.193.397.488	201.397.274.676	0,254	16,24

Sumber: diolah penulis dari Laporan Keuangan PDAM Kota Bandung 1996-2005

Likuiditas PDAM Kota Bandung mengalami kecenderungan terus menurun. Hal ini mencerminkan kurangnya kemampuan keuangan PDAM Kota Bandung untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi kas (uang) yang diharapkan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Modal kerja merupakan keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan sebagai dana yang berputar terus menerus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, termasuk pemenuhan kewajiban lancar. Aktiva lancar yang dapat digunakan tersebut diantaranya kas, sekuritas, persediaan, atau piutang. (Agnes Sawir, 2005: 129-131).

Piutang berkaitan erat dengan perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan kredit. Penjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelanggan, dan tidak langsung menerima

penghasilan berupa kas, melainkan piutang. Kemudian piutang tersebut diharapkan dengan cepat dapat berkonversi menjadi kas sebagai pelunasan dari pelanggan atau disebut perputaran piutang. (Agnes Sawir, 2004: 16). Semakin besar perputaran piutang usaha, semakin mudah perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancar perusahaan. Tapi bila perputaran piutang kecil, perusahaan membutuhkan waktu yang lama dalam pemenuhan kewajibannya.

Dikabarkan pula bahwa, perputaran piutang usaha pada PDAM Kota Bandung adalah belum ideal, hal ini dikarenakan PDAM Kota Bandung banyak mengalami tunggakan piutang (Piutang Macet). Diantaranya PDAM Kota Bandung telah mengalami tunggakan piutang usaha dari pelanggan atas rekening air sebesar Rp. 40 milyar, disampaikan pada Pikiran Rakyat 26 April 2006 (www.gedehacewater.blogspot.com). Menurut Direktur Air Bersih PDAM Kota Bandung Tardan Setiawan dan Koordinator Program *Environmental Cooperation* (ECO)-Asia, Lina Damayanti. (www.tempointeraktif.com), penyebab dari tunggakan piutang tersebut adalah terdapat pelanggan yang mengeluhkan kurangnya pelayanan dari PDAM Kota Bandung akibat: (1) Air yang sering tidak mengalir secara rutin kepada pelanggan, (2) Biaya pemasangan yang mahal sehingga terjadi sambungan gelap, (3) Terjadi kelebihan jumlah tagihan bagi pelanggan karena sambungan gelap kepada pipa pelanggan bersangkutan, (4) dan penyebab lainnya.

Piutang usaha tersebut merupakan hasil penjualan kegiatan usaha utama PDAM yaitu penjualan melalui tagihan rekening air konsumen yang berlangganan air bersih, yang di dalamnya termasuk penagihan biaya pelayanan air kotor (10-

30% dari air bersih). Banyaknya tunggakan pada piutang usaha ini tentunya menjadi gambaran belum idealnya perputaran piutang usaha. Perputaran piutang usaha merupakan perhitungan antara penjualan kredit dengan rata-rata piutang yang terjadi dalam suatu periode. Namun, dalam laporan keuangan PDAM Kota Bandung penjualan yang dimaksud dinyatakan sebagai pendapatan penjualan air, yang terkandung dalam tagihan rekening air. Berikut data penjualan kredit (pendapatan) yang berhubungan dengan piutang usaha (rekening air) dan data piutang usaha.

Tabel 1.2
Data Penjualan Kredit dan Piutang Usaha PDAM Kota Bandung

Tahun	Penjualan Kredit Air Bersih	Penjualan Kredit Air Kotor	Total Penjualan Kredit	Piutang Usaha
1996	28.135.760.480	7.852.522.290	35.988.282.770	11.588.348.840
1997	29.062.467.620	8.104.120.830	37.166.588.450	13.098.634.256
1998	29.593.191.650	8.085.729.010	37.678.920.660	13.852.726.334
1999	29.605.111.215	8.301.373.790	37.906.485.005	17.041.875.229
2000	29.980.128.916	8.471.588.130	38.451.717.046	17.390.306.372
2001	42.656.628.255	11.370.078.600	54.026.706.855	20.604.252.301
2002	68.533.067.193	17.661.199.840	86.194.267.033	21.524.292.800
2003	66.810.138.526	16.291.092.350	83.101.230.876	23.081.730.613
2004	66.771.048.748	16.203.854.920	82.974.903.668	16.422.701.603
2005	67.633.381.388	16.721.596.920	84.354.978.308	16.813.814.059

Sumber: diolah penulis dari Laporan Keuangan PDAM Kota Bandung 1996-2005

Total pendapatan di atas merupakan penjualan kredit terkait rekening air pada PDAM Kota Bandung 1996-2005. Kemudian, dapat diketahui perputaran piutang usaha dan selisih per tahunnya adalah:

Tabel 1.3
Perputaran Piutang Usaha (1996-2005)

Tahun	Rata-rata Piutang Usaha	Penjualan Kredit	Perputaran Piutang Usaha	Selisih (%)
1996	12.952.657.744	35.988.282.770	2,778	-
1997	12.343.491.548	37.166.588.450	3,011	7,72
1998	13.475.689.295	37.678.920.660	2,796	-7,69
1999	15.447.300.782	37.906.485.005	2,454	-13,94
2000	17.216.090.801	38.451.717.046	2,233	-9,87
2001	18.997.279.337	54.026.706.855	2,844	21,46
2002	21.064.272.551	86.194.267.033	4,092	30,50
2003	22.303.011.707	83.101.230.876	3,726	-9,82
2004	19.752.216.108	82.974.903.668	4,201	11,30
2005	16.618.271.331	84.354.978.308	5,076	17,24

Sumber: diolah penulis dari Laporan Keuangan PDAM Kota Bandung 1996-2005

Dari data pada tabel 1.1 dan 1.3, dampak perputaran piutang usaha terhadap likuiditas tidak selalu baik (positif). Sebagai gambaran umum, pada tahun 2004 PDAM Kota Bandung mengalami penurunan likuiditas sebesar -50,13%. Namun, keadaan likuiditas yang menurun tersebut disebabkan oleh meningkatnya perputaran piutang sebesar 11,30%. Lain halnya pada tahun 2005, peningkatan likuiditas sebesar 16,24% terjadi akibat meningkatnya perputaran piutang sebesar 17,24%. Dengan adanya masalah terkait perbedaan hubungan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Hubungan Perputaran Piutang Usaha Terhadap Likuiditas Pada PDAM Kota Bandung**".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan sebagai rincian dari masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana perputaran piutang usaha pada PDAM Kota Bandung.
2. Bagaimana likuiditas pada PDAM Kota Bandung.
3. Bagaimana hubungan perputaran piutang usaha terhadap likuiditas pada PDAM Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengkaji masalah, tentang hubungan perputaran piutang usaha terhadap likuiditas pada PDAM Kota Bandung dengan periode penelitian yang lebih luas. Sedangkan tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui perputaran piutang usaha pada PDAM Kota Bandung.
2. Mengetahui likuiditas pada PDAM Kota Bandung.
3. Mengetahui hubungan perputaran piutang usaha terhadap likuiditas pada PDAM Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadi masukan, sumbangan pemikiran, gambaran mengenai bagaimana hubungan perputaran piutang usaha dengan likuiditas dan sebagai bahan perbandingan serta analisis dalam menerapkan pengendalian atas piutang dalam usaha untuk meningkatkan likuiditas perusahaan

2. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi mengenai pentingnya perputaran piutang usaha terhadap likuiditas perusahaan
- b. Diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian berikutnya

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkembangan perusahaan selalu menjadi perhatian utama setiap manajemen dalam mengelola usahanya, hal ini dikarenakan tingkat perkembangan dan pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan manajemen. Sehubungan dengan itu, pada umumnya setiap perusahaan telah mempersiapkan perencanaan yang sistematis dalam mengelola sumber dayanya untuk dapat mencapai tingkat perkembangan yang diharapkan bagi perusahaan.

Dalam prakteknya, perkembangan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kegiatan usaha perusahaan yaitu melalui perluasan maupun pemberian kemudahan untuk pelanggan sehingga volume penjualan dapat ditingkatkan. Untuk itu, perusahaan cenderung melakukan penjualan kredit. Penjualan kredit merupakan kegiatan penjualan dengan penangguhan pembayaran penjualan, yang menimbulkan piutang usaha. (Agnes Sawir, 2005: 198). Dalam DE Kieso, dkk (2002: 386),

Piutang usaha (*account receivables*) adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Piutang usaha biasanya dapat ditagih dalam waktu 30 sampai 60 hari dan merupakan akun terbuka (*open accounts*) yang berasal dari perluasan kredit jangka pendek.

Piutang usaha adalah salah satu komponen modal kerja yang penting, karena merupakan aktiva lancar yang sangat likuid. Sebagai salah satu komponen

modal kerja maksudnya, piutang usaha merupakan investasi perusahaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. (Agnes Sawir, 2005: 129). Sedangkan sebagai aktiva lancar yang sangat likuid, piutang usaha dianggap dengan mudah dicairkan atau diuangkan. (S Munawir, 2004: 74). Piutang usaha terjadi akibat penjualan kredit, dan dengan penjualan kredit perusahaan tidak akan langsung menerima kas (penerimaan kas). (Mamduh M Hanafi, 2004: 554). Untuk itu, perusahaan akan mengalami suatu periode dalam menerima dana berupa kas atau dapat disebut sebagai periode pengumpulan piutang usaha yang perlu untuk dianalisis dan dikendalikan. Menurut S Munawir (2004: 75):

Posisi piutang dan taksiran periode pengumpulan piutang usaha dapat dinilai dengan menghitung perputaran piutang usaha (*turnover receivable*) yang ditentukan dengan membagi total penjualan kredit (neto) dengan piutang usaha rata-rata.

$$\text{Perputaran Piutang Usaha} = \frac{\text{Penjualan Kredit Bersih}}{\text{Rata - rata Piutang Usaha}}$$

Penjualan kredit merupakan unsur pada Laporan Laba Rugi. Menurut Donald Kieso, dkk (2002: 157) penjualan dapat disebut pula sebagai pendapatan, dengan pengertian “Subbagian ini menyajikan penjualan, diskon, retur penjualan, harga, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan tujuan untuk memperoleh jumlah bersih pendapatan penjualan (*sales revenue*)”. BN Marbun (2003: 94) menjelaskan, *sales revenue* merupakan “Hasil total yang diterima atau yang akan diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu”. *Sales revenue* diakui oleh perusahaan pada saat penjualan. Dalam Donald Kieso, dkk (2002: 153), Pendapatan merupakan arus masuk aktiva selama suatu periode,

dalam rangka aktivitas operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Dengan demikian *revenue* (pendapatan), dari penjualan secara kredit, dapat digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan perputaran piutang usaha.

Perusahaan biasanya menggunakan pula perhitungan jumlah hari rata-rata periode pengumpulan piutang dalam satu tahun yaitu dengan membagi jumlah hari dalam setahun (365 atau 360) dengan perputaran piutang usaha. Rata-rata periode pengumpulan piutang ini bermula sejak terjadinya penjualan kredit (timbulnya piutang usaha) sampai dengan pelunasan kredit dari konsumen (timbulnya kas). (Agnes Sawir, 2005:16; Mamhud M Hanafi, 2004: 564). Aturan yang berlaku umum dalam penagihan piutang usaha adalah 60 hari, atau sama dengan 6 kali perputaran piutang pada jangka waktu satu periode operasi perusahaan. (S. Munawir, 2004: 76). Semakin tinggi perputaran piutang usaha, semakin cepat perusahaan mendapatkan kas (uang tunai).

Ketersediaan kas dengan cepat pada perusahaan, mengakibatkan perusahaan dapat memenuhi kewajiban lancar perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancar dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas. Menurut Farah M (2007: 54), Likuiditas digunakan oleh perusahaan, selaku pemberian kredit, untuk mengetahui apakah aktiva lancar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban lancarnya. Aktiva lancar tersebut akan dikonversi menjadi kas (uang) sehingga dengan mudah dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar perusahaan. Sebuah perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban lancar atau kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi digolongkan kepada perusahaan yang “likuid”. Sedangkan perusahaan

yang tidak mampu memenuhi kewajiban lancarnya disebut perusahaan “illikuid”. (Agnes Sawir, 2005: 142).

Rasio likuiditas digunakan untuk menilai keadaan keuangan perusahaan yang memberikan pengukuran relatif dari kegiatan operasional perusahaan. Jika suatu perusahaan hanya mementingkan laba semata dan mengabaikan likuiditas yang rendah maka perusahaan tidak akan mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya yang pada akhirnya akan menyulitkan perusahaan dalam menyelenggarakan kegiatan operasional atau bahkan mengakibatkan bankrut.

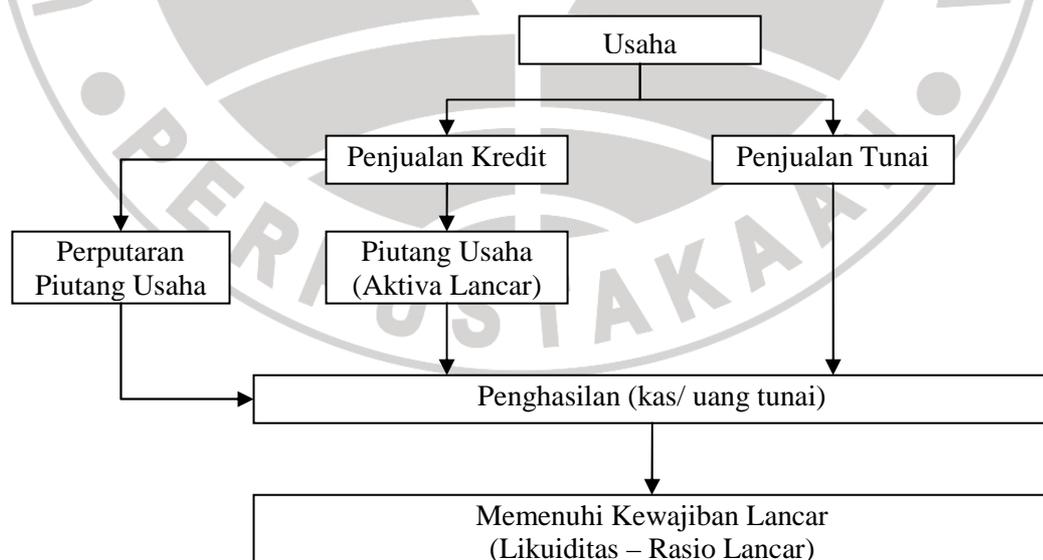
Untuk mengetahui rasio likuiditas suatu perusahaan, terdapat beberapa perhitungan yaitu: *Current Ratio*, *Quick Ratio*, dan *Cash Ratio*. *Current Ratio* merupakan rasio yang paling umum digunakan dalam menganalisis likuiditas pada perusahaan, karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kewajiban jangka pendek dipenuhi oleh aktiva lancar, yang diperkirakan menjadi uang tunai (kas). Dalam S Munawir (2004: 72) dan Agnes S (2004: 8), *Current Ratio* merupakan perbandingan antara Aktiva Lancar dan Kewajiban Lancar.

$$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Current ratio yang rendah biasanya menunjukkan terjadinya masalah likuiditas, *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus bagi perusahaan, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur. Rasio ideal ditentukan oleh *rule of thumb* (ketentuan umum) dengan mempertimbangkan faktor tertentu seperti jenis industri, kebiasaan kredit, atau analisis *trend*. Namun, aturan umum yang digunakan adalah 2:1. (John JW, KR Subramaryam, RF Halsey, 2004: 193)

Berdasarkan rumus *current ratio* di atas, perubahan atas aktiva lancar atau kewajiban lancar akan mempengaruhi likuiditas. Aktiva lancar diharapkan dapat digunakan sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban lancar, hal ini berkaitan dengan modal kerja yang merupakan aktiva lancar (kas, sekuritas, piutang usaha, dan persediaan). Piutang usaha mengalami perputaran piutang yang menggambarkan berapa kali piutang usaha dapat dikonversikan menjadi kas (uang tunai) untuk memenuhi kewajiban lancar dalam jangka waktu satu tahun operasi perusahaan. Semakin besar perputaran piutang usaha suatu perusahaan maka semakin cepat perusahaan mendapatkan uang (kas) untuk memenuhi kewajibannya, atau meningkatkan likuiditas.

Berdasarkan Kerangka Pemikiran inilah, telah terbentuk suatu gambaran kerangka pemikiran untuk penelitian antara dua variabel yaitu untuk menjelaskan hubungan perputaran piutang usaha terhadap likuiditas.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

1.6 Asumsi

Penelitian ini memiliki asumsi diantaranya:

1. Perusahaan selalu memiliki asumsi dasar yaitu *Going Concern*. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tetap menyediakan atau menyusun Laporan Keuangan sebagai sumber informasi.
2. Pencatatan secara Akrua, pendapatan diakui pada saat diperoleh bukan pada saat pendapatan diterima secara tunai.
3. Penyisihan piutang tak tertagih dibuat dalam jumlah yang layak, berdasarkan daftar umur piutang yang telah ditentukan sebelumnya.

1.7 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Husein Umar (2004: 104) adalah:

”Hipotesis adalah jawaban suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya”.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

”Terdapat Hubungan Yang Positif Antara Perputaran Piutang Usaha Terhadap Likuiditas”.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada:

Nama Perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota
Bandung, Tirta Wening

Alamat : Jalan Badaksinga Nomor 10 Bandung

Telepon : (022) 2506581 - 2509030 - 2509051 – 2509032

Fax : (022) 2508063

Sedangkan waktu penelitian atau pengumpulan data primer pada perusahaan, dilaksanakan pada bulan Juli – September 2008.

